



FRAKSI PARTAI GERINDRA

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext.: 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
- 2. PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA**
- 3. RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
DANAU MANINJAU TAHUN 2018-2038**

Disampaikan dalam Rapat Kerja

Pembahasan Akhir Komisi Dengan Pemerintah Daerah

Rabu, 27 Maret 2019

Juru Bicara: Ismunandi Sofyan, SE

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang Terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Dinas / Badan /
Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hadirin Hadirat yang Berbahagia

Alhamdulillah rahbil a'lam, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua pada hari ini, pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir Komisi Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Muliakan

Dalam kesempatan pertama ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Panitia Khusus, Panitia

Pembahasan, bersama OPD terkait yang sudah melakukan pembahasan atas tiga Ranperda, yakni:

1. **Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan**
2. **Ranperda Tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja**
3. **Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau 2018-2038**

Semoga seluruh jerih payahnya, mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT dan buah yang dihasilkan dapat hendaknya bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Selanjutnya, terkait Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Fraksi Gerindra menyampaikan harapan, saran dan masukan:

1. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas Ranperda ini. Karena keberadaan Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini di Sumatera Barat, merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan.
2. Bertambahnya kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah yang membagi kewenangan urusan pendidikan mulai dari pusat hingga ke kabupaten/kota. Dimana Pemerintah Provinsi mendapat kewenangan pada jenjang pendidikan menengah atas, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus. Sehingga, kehadiran Perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi mengelola urusan pendidikan yang jadi kewenangannya. Tak hanya itu, kehadiran produk hukum daerah ini akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan.
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar tentang masih tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Barat dengan menyumbang angka sebesar 9,5 persen di pertengahan tahun 2018, merupakan tantangan tersendiri dalam urusan pendidikan kejuaraan di Sumbar ke depannya. Fraksi Gerindra ingin agar masalah ini mendapatkan perhatian serius dari

Pemerintah Provinsi Sumbar. Karena, salah satu faktor penyebabnya yakni, mutu lulusan SMK yang belum siap pakai dan punya daya saing rendah di dunia kerja.

4. Mangkut penyebaran guru-guru yang tidak seimbang antara sekolah yang berada di pusat kota dan pelosok nagari/desa, Fraksi Gerindra minta Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil langkah-langkah nyata dan langkah cepat dalam menyeimbangkan penyebaran tenaga pendidik ini. Karena ketimpangan ini akan banyak pengaruhnya pada mutu pendidikan dan tidak optimalnya keberhasilan pembangunan urusan pendidikan di Sumatera Barat.
5. Menyangkut inventarisasi dan pengelolaan aset sekolah-sekolah SMA/SMK yang beralih kewenangan ke provinsi, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Sumbar segera menyelesaikan pendataan dan penyerahan aset ini dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Sehingga dengan data yang jelas akan memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Termasuk, pemuktahiran data-data guru honorer yang mengajar di sekolah menengah selama ini.

Hadirin Yang Kami Muliakan

Menyangkut Ranperda Penyelenggaraan Tenaga Kerja, Fraksi Gerindra menyampaikan, harapan, saran dan masukan, sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra mendukung sekali Ranperda ini. Dan Ranperda ini diharapkan mampu menjawab persoalan tenaga kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dapat memberikan dukungan dalam rangka melengkapi muatan lokal atas undang-undang dan peraturan menteri serta aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan.
2. Bagi Fraksi Gerindra, keberadaan Ranperda ini, hendaknya menjadi jawaban tentang keluhan masyarakat yang kadang kala hanya menjadi tamu di sekitar kawasan industri. Karena itu hubungan industrial dengan pemerintah harus diselaraskan lebih baik lagi, termasuk dengan peningkatan SDM dan

pengawasan, agar lahirnya Raperda ini dapat menjawab persoalan tenaga kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3. Fraksi Gerindra berpendapat, dengan hadirnya Peraturan Daerah ini, maka tanggungjawab pemerintah daerah dalam menetapkan rencana tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja akan semakin terwujud. Sehingga, akan ada keselarasan informasi antara keahlian pencari kerja dengan kriteria lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Serta komitmen bersama dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, baik menyangkut upah maupun kesejahteraan.

Bapak/Ibu Yang Terhormat

Menyangkut Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2018-2038, Fraksi Gerindra menyampaikan, harapan, saran dan masukan sebagai berikut:

1. Kehadiran Perda ini hendaknya menjadi jawaban dari masalah-masalah mendasar yang kini masih menggayut di sekitar areal Danau Maninjau. Dan menjadi pedoman utama dalam mengatur pemanfaatan lahan dalam berbagai bentuk, di sekitar Daerah Tangkapan Air di kawasan Danau Maninjau.
2. Tentang penetapan kawasan khusus untuk areal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Fraksi Gerindra meminta, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sesegera mungkin melakukan negosiasi ulang tentang pajak air permukaan Danau Maninjau, yang selama ini dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik oleh PLN (PLTA Maninjau). Karena Kami menilai pajak air permukaan ini, belum memberikan sumbangan yang memadai untuk peningkatan pendapatan daerah. Apalagi dalam Ranperda ini, sudah dijelaskan bahwa sebanyak 8,47 hektar kawasan Danau Maninjau diperuntukkan khusus bagi PLTA.
3. Khusus peruntukan usaha Kerambah Jala Apung (KJA) yang akan dibatasi dengan ketat dan mengalami pengurangan yang

begitu banyak, hingga hanya 6000 KJA lagi, kami minta agar ketentuan ini jangan menjadi gejala di tengah masyarakat. Dan sesegera mungkin dilakukn sosialisasi dan komunikasi intensif dengan masyarakat. Sebab selama ini, mereka mengandalkan mata pencaharian dan perekonomian dari usaha KJA ini.

4. Soal peruntukan KJA per-Nagari yang tidak sama setiap Nagari, Fraksi Gerindra minta pelaksanaannya nanti diatur sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan gejala antar nagari di *salingka* Danau Maninjau. Untuk itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membentuk Tim Terpadu Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau.
5. Fraksi Gerindra juga meminta, pelaksanaan Ranperda ini hendaknya diselaraskan dengan ketentuan lain, seperti Perda Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang baru saja kita sahkan di penghujung tahun 2018 lalu.

Hadirin, Bapak/Ibu Yang Mulia

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang:

1. **Penyelenggaraan Pendidikan**
2. **Penyelenggaraan Tenaga Kerja**
3. **Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau 2018-2038**

Maka berdasarkan catatan-catatan yang kami sampaikan diatas, dengan mengucapkan **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**, **Fraksi Gerindra** dapat **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah Tentang:

1. **Penyelenggaraan Pendidikan**
2. **Penyelenggaraan Tenaga Kerja**

**3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau
Maninjau 2018-2038**

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua



Sekretaris

H. HIDAYAT, S.S, M.P. ISMUNANDI SOFYAN, SE

Penasihat :

1. H. Darmawi, BSc

Anggota :

2. Supardi

3. H. Sabrana, SE

4. Ahmad Khaidir, S.Fil.I

5. JJ Dt. Gadang, SE

6. Sudarmi Saogo